

EVALUASI PROGRAM PELATIHAN WIRAUSAHA MODEL CEFE DI KOTA PONTIANAK

Oleh:
SUSILA ERNAWATI
NIM. E21111066

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

Email : sernawa@yahoo.co.id

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini diantaranya proses perekrutan peserta pelatihan tidak transparan serta sumber daya manusia bukan kalangan yang mempunyai latar belakang enterpreuner. Adapun tujuan penelitian adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan proses pelaksanaan program pelatihan wirausaha model CEFE di Kota Pontianak belum maksimal. Dengan menggunakan pendekatan teori Sabatier dan Mazmanian yang terdiri dari tiga aspek yaitu a. Karakteristik Masalah b. Daya Dukung Peraturan c. Variabel Non Peraturan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitian ditinjau dari aspek isi kebijakan yaitu pertama karakteristik masalah, dimana masih kurangnya ketersediaan teknologi dan teori teknis, kedua daya dukung peraturan yang belum mendukung dilaksanakannya proses pelatihan ketiga variabel non peraturan di mana implementor kurang memperhatikan kondisi sosial budaya tempat dilaksanakannya kebijakan tersebut. Saran yang dapat diberikan sebagai masukan adalah sebagai berikut: pembuat kebijakan harus lebih memahami karakteristik masalah yang ada dalam pelaksanaan pelatihan yang pernah dilaksanakan sebelumnya agar dapat meminimalkan terjadinya kesalahan yang sama. Saran lainnya yaitu hendaknya pembuat kebijakan membuat suatu peraturan yang benar-benar dapat menjadi dasar pelaksanaan pelatihan dengan memberikan sanksi bagi pelanggarannya serta dengan memperhatikan kondisi sosial budaya setempat agar pelatihan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar dan agar hasil akhir pelatihan dapat terlaksana seperti apa yang menjadi tujuan pembuat kebijakan.

Kata-kata kunci : Evaluasi, Program, Pelatihan Wirausaha, kebijakan publik.

TRAINING PROGRAM EVALUATION OF MERCHANDISISE MODEL CEFE IN TOWN PONTIANAK

Abstract

The problem in this study include proses recruitment of trainees are not transparent and human resources are not from among those who have a background in enterpreuner. As for the purpose of this study was to analyze the factor that led to the implementation of entrepreneurship training of CEFE's program in pontianak. By using a theoretical theory of Sabatier and Mazmanian consisting of three aspect are characteristic of the problem, the carrying capacity of regulatory and non regulatory variables. The method used in this research is descriptive method with qualitative approach. As for the results in terms of policy content aspect that is the first characteristic of the problem, which is still a lack of availability of technology and technical theory. The second is carrying the regulations do not yet support the implementation of the training process. The third is non-regulatory variables where implementor less attetion to social and cultural conditions where the policy implementation. Advice that can be given as an input is as follows : policymakers need to better understand the characteristics of the existing problems in the implementation of training never before implemented in order minimize the occurrence of the same error. Other suggestions which should policymakers make a rule that actually can be the basis for implementing the training by providing sanctions for the offense as well as taking into consideration the local socio-cultural training can fit the needs of local communities and that the final results of trainings held can be implemented as any the objectives of policy makers

Keywords: Evaluation, Program, Entrepreneurial Training, public policy.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara di Asia dengan jumlah penduduk tertinggi nomor empat dunia yakni 248.645.008 jiwa tahun 2013 dan berdasarkan angka Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita peringkat 122 negara termiskin dari 184 negara. Indonesia lebih miskin dari Singapore, Malaysia bahkan Thailand, artinya Indonesia dengan segala potensi alam yang ada masih belum mampu memberikan nilai tambah yang lebih bagi perekonomian bangsa secara merata dan menyeluruh. Dampak dari kemiskinan di Indonesia adalah Pengangguran, dimana jumlah pengangguran di Indonesia Februari 2013 mencapai 17,7 juta jiwa. Angka tersebut akan mengakibatkan ketidak stabilan perekonomian yang dapat memperlambat kemajuan bangsa, perekonomian memiliki peranan penting dalam pembangunan suatu negara, jika perekonomian suatu bangsa lemah tentu akan sulit mewujudkan kesejahteraan suatu bangsa. Semakin tinggi jumlah wirausaha di suatu negara tentu semakin tinggi pula pertumbuhan perekonomiannya, untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian suatu bangsa diperlukan setidaknya 2 % *entrepreneur* dari total jumlah penduduk suatu negara. Kewirausahaan sosial atau

yang dikenal dengan istilah *Social Entrepreneur* merupakan salah satu faktor yang memberi dampak positif terhadap pengembangan perekonomian bangsa. wirausaha adalah orang yang menciptakan bisnis baru dengan mengambil resiko dan ketidak pastian demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang dengan menggabungkan sumber daya yang diperlukan untuk mendirikan, wirausaha tidak mencari resiko, mereka mencari peluang. Tingginya jumlah penduduk dengan usia produktif yang tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan membuat tingginya angka pengangguran, pilihan menjadi seorang wirausaha merupakan alternatif mengurangi tingginya angka pengangguran, menjadi wirausaha bukanlah sesuatu yang instan, selain bakat yang dimiliki untuk menjadi seorang wirausaha, mempelajari banyak hal agar dapat menjadi seorang wirausaha yang sukses menjadi kebutuhan bagi calon maupun seorang wirausaha. Di Indonesia, khususnya di Pontianak ketertarikan masyarakat untuk membuka usaha sebagai tujuan masa depan masih merupakan bukan suatu kebanggaan bagi masyarakat.

Sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap perkembangan wirusaha di Indonesia khususnya di Kota Pontianak dalam hal ini Departemen

Perindustrian melalui Unit Pelatihan Industri Kecil Menengah (UP-IKM) bekerja sama dengan Bank Mandiri membuat program Pelatihan Kewirausahaan Model CEFE. *Creation Enterprises Formation Of Entrepreneurs* atau disingkat 'CEFE' yaitu Pembentukan Usaha - pembentukan pengusaha adalah Pelatihan kewirausahaan yang dilakukan dalam rangka merekrut calon wirausaha ataupun mereka yang sudah mempunyai usaha untuk mengembangkan usahanya melalui pelatihan merupakan salah satu program yang di laksanakan sebagai bentuk kepedulian Pemerintah dalam hal ini Departemen Perindustrian pada pentingnya wirausaha di Indonesia. CEFE merupakan suatu program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas dan inovatif.

CEFE merupakan pelatihan yang dilakukan untuk memberi pendidikan dan pelatihan bagi para pengusaha maupun calon pengusaha dalam berwirausaha diantaranya :

Mendorong peserta agar lebih terpacu motivasinya untuk membuka dan mengembangkan usaha, melatih peserta agar secara bertahap dapat mempunyai kompetensi kewirausahaan dan bisnis, melatih wirausaha agar mampu untuk mendirikan dan mengembangkan usaha yang layak dan dapat menciptakan

kesempatan kerja bagi dirinya sendiri maupun orang lain sesuai dengan tuntutan pembangunan.

Berdasarkan pengamatan awal pada lokasi penelitian program pelatihan wirausaha model 'CEFE' belum mencapai hasil seperti yang diharapkan dikarenakan beberapa indikasi permasalahan dalam program pelatihan model 'CEFE' yaitu ::

Proses perekrutan peserta pelatihan tidak transparan, Sumber Daya Manusia bukan kalangan yang mempunyai latar belakang enterpreuner

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang diuraikan diatas untuk lebih fokus pada masalah yang akan penulis paparkan maka penulis membatasi masalah pada ' Evaluasi Proses Pelaksanaan Program Pelatihan Wirausaha Model 'CEFE' Di Kota Pontianak' Adapun rumusan masalah yang dikemukakan sebagai berikut :
'Apakah Proses Pelaksanaan Program Pelatihan Wirausaha Model 'CEFE' di Kota Pontianak sudah berjalan dengan baik.

B. KERANGKA TEORITIS

Kebijakan yang baik tidak memiliki arti apa-apa jika tidak dapat

diimplementasikan. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan.

Evaluasi berasal dari kata bahasa Inggris ' *Evaluation* ' yang diserap dalam perbendaharaan istilah bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia menjadi 'Evaluasi' yang dapat diartikan memberikan penilaian dengan membandingkan sesuatu hal dengan satuan tertentu sehingga bersifat kuantitatif. Pengertian evaluasi yang bersumber dari kamus Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English evaluasi adalah to find out, decide the amount or value yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. (Oxford, 2008:151). Abdullah (1987:30) mengemukakan definisi evaluasi adalah sebagai salah satu fungsi manajemen berurusan dan berusaha untuk mempertanyakan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan dari suatu rencana sehingga mengukur se objektif mungkin hasil-hasil dari pelaksanaan itu dengan ukuran-ukuran yang dapat diterima pihak-pihak

yang mendukung maupun yang tidak mendukung suatu rencana.

Menurut Dunn (dalam Nugroho, 2009:608-610) istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan dan target, ibarat sebuah perjalanan menuju sebuah tujuan, maka ada saja kemungkinan resiko yang menghadang selama perjalanan yang membuat perjalanan tersebut tidak nyaman dan berkonflik walau tetap sampai tujuan, begitu juga dengan sebuah kebijakan yang sudah dirancang dan ditetapkan untuk ke sebuah tujuan, kemungkinan apa saja mungkin terjadi. Agar dalam kontek dan tujuan untuk memastikan agar perjalanan dan arahnya bisa dilakukan dengan lancar dan sampai pada tujuannya seperti yang diharapkan, maka diperlukan sebuah kegiatan yang bernama evaluasi. Evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa bukan hanya arah, tetapi kecepatan, maksud serta

tujuan yang diharapkan bisa diraih meski selalu ada kemungkinan resiko kegagalan. Suatu proses evaluasi lebih menekankan pada bagaimana suatu hasil atau *outcome* diperoleh dibandingkan melihat hasil itu sendiri, berdasarkan pernyataan itu dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan suatu program dilakukan dengan memfokuskan diri pada hasil dari program. Sedangkan evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana sesuai dengan rencana, evaluasi menunjuk pada apa (*what*) kegiatan yang dilakukan dalam program, siapa (*who*) orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab program, kapan (*when*) kegiatan akan selesai.

Evaluasi Kebijakan Publik menurut Mustofadijaya (dalam Rusli, 2013:119) merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik, oleh karena itu evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atas sesuatu fenomena di dalamnya terkandung pertimbangan nilai (*value judgement*) tertentu. Pembuat kebijakan dan para administrator senantiasa membuat penilaian terhadap keberhasilan atau dampak dari kebijakan-kebijakan khusus, program-program dan proyek-proyek yang dilaksanakan itu, selanjutnya James Anderson (dalam Rusli, 2013:119) membagi evaluasi kebijakan

publik menjadi tiga yaitu : tipe pertama, evaluasi kebijakan publik yang dipahami sebagai kegiatan fungsional, kedua, evaluasi yang memfokuskan pada bekerjanya kebijakan, ketiga evaluasi kebijakan sistematis yang melihat secara objektif program-program kebijakan yang ditujukan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan sejauh mana tujuan-tujuan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan telah dicapai.

Menurut Sabatier dan Mazmanian (Wibawa, 2010) evaluasi proses kebijakan mencakup karakteristik masalah, daya dukung peraturan dan variabel non peraturan

1. Karakteristik Masalah

Yaitu dimana dalam melaksanakan suatu kebijakan harus sudah memprediksi mudah/sukarnya masalah yang akan terjadi dalam pelaksanaannya dengan memperhatikan :

a. Ketersediaan teknologi dan teori teknis, Semakin maju suatu Negara semakin maju pula teknologi yang dimilikinya, bila teknologi tersebut dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk sarana suatu kegiatan tentu akan memudahkan pelaksanaan kegiatan tersebut. Begitu pula dengan pelaksanaan suatu kebijakan, pemanfaatan

teknologi sebagai sarana pelaksanaan suatu kebijakan membantu dan memudahkan proses implementasi kebijakan tersebut

- b. Keragaman perilaku kelompok sasaran, Dengan latar belakang yang berbeda setiap peserta pelatihan mempunyai tujuan yang berbeda pula, awalnya ada peserta yang ikut pelatihan disebabkan karena memang benar-benar ingin mengetahui tentang berwirausaha, ada yang sekedar ingin mencari kesibukan tanpa berniat menjadi wirausaha
- c. Sifat populasi, Jumlah penduduk usia produktif yang tidak seimbang dengan jumlah lapangan pekerjaan dapat menjadi tolok ukur tingginya angka pengangguran.
- d. Derajat perubahan perilaku yang diharapkan. Dengan mengikuti pelatihan wirausaha model CEFE akan ada perubahan perilaku dari masyarakat yang menjadi kelompok sasaran atau masyarakat yang sudah mengikuti pelatihan dalam memandang wirausaha

2. Daya Dukung Peraturan

Dalam melaksanakan suatu kebijakan, pembuat suatu kebijakan sudah memperhitungkan daya dukung yang diperlukan dalam melaksanakan suatu

kebijakan yaitu : a. Kejelasan/konsistensi tujuan, Sebuah kebijakan harus mempunyai kejelasan / konsistensi tujuan, tujuan yang jelas dan terarah akan memudahkan proses pelaksanaannya b. Teori Kausal yang memadai, Teori kausal atau teori sebab akibat merupakan dasar dilaksanakan suatu kebijakan, pembuat suatu kebijakan mendapatkan suatu sebab yang mengharuskan dibuatnya sebuah kebijakan dan didalam pelaksanaan suatu kebijakan tersebut akan selalu muncul suatu akibat yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan tersebut c. Sumber keuangan yang mencukupi, Sumber keuangan yang mencukupi merupakan syarat mutlak yang harus ada dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan, suatu kebijakan tidak akan dapat dilaksanakan tanpa adanya sumber keuangan yang mencukupi untuk membiayai proses pelaksanaan kebijakan tersebut d. Integrasi organisasi pelaksana, Dalam suatu organisasi yang terdiri dari banyak orang sering terjadi perbedaan dalam memahami suatu permasalahan, begitupun pemahaman setiap orang pada suatu kebijakan, semakin banyak perbedaan pemahaman akan semakin banyak perbedaan yang terjadi dalam mengimplementasi suatu kebijakan. e. Rekrutmen dari pejabat pelaksana, dalam suatu organisasi yang terdiri dari banyak orang sering terjadi

perbedaan dalam memahami suatu permasalahan, begitupun pemahaman setiap orang pada suatu kebijakan, semakin banyak perbedaan pemahaman akan semakin banyak perbedaan yang terjadi dalam mengimplementasi suatu kebijakan.

f. Akses formal ke organisasi lain

3. Variabel Non Peraturan

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan hal lain yang harus diperhatikan adalah Variabel Non Peraturan yang terdiri dari :

a. Kondisi sosial budaya ekonomi di sekitar, Memperhatikan kondisi sosial budaya ekonomi disekitar menjadi keharusan bagi setiap pembuat kebijakan agar dalam menetapkan dan membuat suatu kebijakan

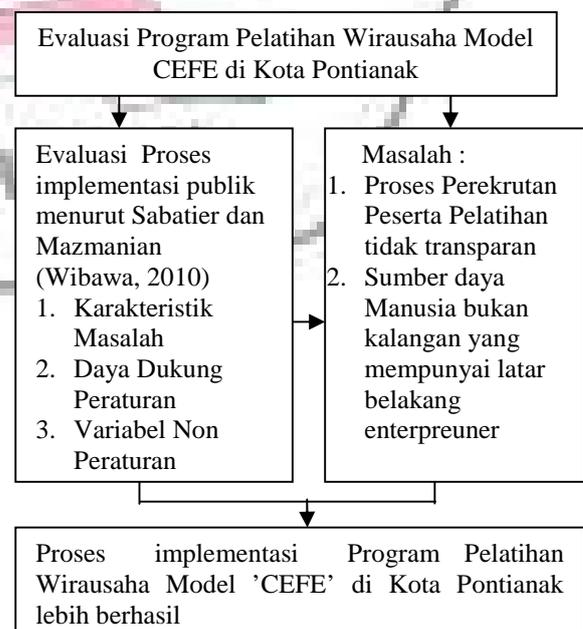
b. Perhatian pers terhadap masalah kebijakan tersebut, semakin besar perhatian pers terhadap suatu kebijakan yang akan dan sedang dilaksanakan akan semakin banyak orang yang akan peduli dan menjadi pemerhati dan pengawas terlaksananya kebijakan tersebut

c. Dukungan publik, Dukungan publik dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan sangat diperlukan

d. Sikap dan sumber daya kelompok sasaran utama, Ketertarikan sekelompok masyarakat yang menjadi peserta pelatihan wirausaha model CEFE merupakan sumber daya sasaran utama dalam proses pelaksanaan kebijakan yang dilakukan Unit Pelatihan

Industri Kecil Menengah, ketertarikan merupakan sikap peduli e, Dukungan kewenangan f. Komitmen Suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik bila para pejabat pelaksana mempunyai komitmen dan kemampuan dalam memimpin anggota organisasi tersebut untuk turut serta dan mendukung dalam proses pelaksanaan kebijakan yang telah disetujui untuk dilaksanakan dan kemampuan pejabat pelaksana, Dalam hal ini peneliti akan meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Evaluasi Pelatihan Wirausaha Model CEFE di Kota Pontianak belum terlaksana dengan maksimal menggunakan teori Sabatier dan Mazmanian yang terdiri dari (1) Karakteristik Masalah (2) Daya dukung peraturan (3) Variabel Non Peraturan yang digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1. Kerangka Fikir



C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2002:3) Metodologi Kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, berdasarkan pendapat tersebut maka dalam penelitian ini peneliti berusaha mendiskripsikan berbagai hal yang menyangkut Proses Pelaksanaan Program Pelatihan Wirausaha Model CEFE di Kota Pontianak Adapun alasan peneliti memilih tempat tersebut karena lokasi penelitian memiliki relevansi dengan topic penelitian yang akan penulis lakukan dan dipilih karena penulis melihat ada permasalahan dalam pelaksanaan pelatihan wirausaha model CEFE sehingga dalam pelaksanaannya belum maksimal.

Berdasarkan pandangan tersebut, maka subjek penelitian ini terdiri dari : Kepala Subbag Tata Usaha, Kepala Seksi Pelatihan Panitia Penerimaan Peserta Pelatihan model CEFE, 1 (satu) panitia penerimaan peserta pelatihan model CEFE, 1 (satu) orang calon peserta dan 1 (satu) orang alumni Pelatihan Model CEFE.

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :Teknik Observasi, teknik observasi dipergunakan peneliti dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian dengan menggunakan pancaindera selanjutnya peneliti mencatat, menganalisis dan menyimpulkan, Teknik Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan serta Dokumentasi

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai bentuk kepedulian Pemerintah pada masalah ini Departemen Perindustrian melaksanakan Program Pelatihan Kewirausahaan Model CEFE.

Adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya Pelatihan Kewirausahaan Model CEFE di Pontianak adalah : Merekrut masyarakat yang mempunyai jiwa wirausaha untuk membuka dan menambah wawasan dalam berwirausaha, melatih peserta secara bertahap memiliki kompetensi kewirausahaan dan bisnis,

melatih wirausaha agar mampu untuk mendirikan dan mengembangkan usaha yang layak dengan memanfaatkan peluang yang ada sesuai potensi sumber daya yang ada, mengembangkan sumber daya yang mampu menciptakan kesempatan kerja bagi diri sendiri maupun orang lain sesuai tuntutan pembangunan pada saat ini.

Program Pelatihan Wirausaha Model CEFE dilaksanakan dimulai dari pengumuman di koran dimana disebutkan persyaratan bagi calon peserta yaitu : Sehat jasmani dan rohani, fotocopi Kartu Tanda Pengenal, fotocopy Ijazah terakhir, Min. SLTA, diutamakan bagi yang sudah memiliki usaha (Fotocopy S.ket.Usaha dari RT setempat)

Setelah masa pendaftaran yang dilakukan selama 1 (satu) bulan, bagi peminat yang lulus seleksi administrasi dilanjutkan dengan tes tertulis yang ditentukan waktu dan tempatnya oleh panitia, setelah lulus tes tertulis, calon peserta yang dinyatakan lulus mengikuti tes wawancara yang selanjutnya calon peserta dinyatakan lulus dalam wawancara dinyatakan berhak mengikuti pelatihan wirausaha model CEFE yang dilaksanakan selama 24 hari kerja peserta pelatihan sebanyak 24 (dua puluh empat) orang dengan tenaga instruktur berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari 1 (satu) orang dari PNS, 2 (dua) orang dari Lembaga Pelatihan Pontianak, sedangkan

Nara sumber pada kegiatan Program Pelatihan Kewirausahaan Model CEFE terdiri dari 1 (satu) orang instruktur penjaskes, 1 (satu) orang dari PT. Pupuk Kaltim Cabang Kalimantan Barat, 1 (satu) orang Kiat Wirausaha Sukses. Tim Penguji pada kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Model CEFE berasal dari Lembaga Keuangan/Bank yang berada di kota Pontianak yang membidangi Bagian Perkreditan bagi pelaku Industri Kecil Menengah yaitu Bank BRI Agro, Bank Bukopin dan Bank Kalbar dan Panitia pelaksanaan pada Pelatihan Kewirausahaan Model CEFE terdiri dari 7 (tujuh) orang.

Materi pelaksanaan Pelatihan Kewirausahaan Model CEFE yang disampaikan secara garis besar adalah : Kewirausahaan , Latar Belakang Peserta, Pemasaran, Manajemen Produksi Organisasi Keuangan, Penyusunan Perencanaan Usaha dan Evaluasi Metode yang dipergunakan dalam pelatihan adalah *Structure Learning Exercise* (SLE), peserta belajar dari pengalaman sedang teknik yang digunakan meliputi : Game/simulasi, *Exercise* /latihan, Diskusi, Kerja Kelompok, *Lecture*/ceramah, *Energizer*/kekuatan,*Field Work* (kerja lapangan), Evaluasi

Secara umum pelatihan wirausaha model CEFE atau *Creation Of Enterprises*

Through Formation Of Entrepreneurs adalah pelatihan penciptaan perusahaan melalui pembentukan wirausaha. CEFE dikatakan juga sebagai konsep, ekonomi yang bertumpu pada kompetensi melalui pembentukan wirausaha, Cefe juga dikatakan sebagai model pelatihan, penciptaan perusahaan melalui pembentukan wirausaha, yang menjadi konsep dasar pengembangan wirausaha adalah :

Wirausaha harus membuat keputusan sendiri dan bertanggung jawab bagi keputusan dan tindakan, wirausaha tidak boleh disuapi dengan pelayanan, wirausaha bertumpu pada energi kreatifitas dan kekuatan sendiri, sedangkan ciri-ciri wirausaha dapat di rumuskan dalam 10 (sepuluh) C yaitu :

1. *Commitement* (Janji, Tanggung jawab) niat yang kuat dan tidak ada kata menyerah,
2. *Confidence* (kepercayaan) percaya diri, berani mengambil keputusan dan berani menanggung resiko,
3. *Cooperative* (bekerja sama) terbuka dan mau berkerjasama dalam mengembangkan diri,
4. *Care* (memperhitungkan) perhatian mulai dari hal yang terkecil,
5. *Creative* (memiliki daya cipta) tidak puas dengan apa yang ada, selalu mencari terobosan baru,
6. *Challenge* (penantang) melihat tantangan atau kendala sebagai pesyaratan untuk maju,
7. *Calculation* (memperhitungkan)

perhitungan yang objektif, nalar dan factual, 8. *Communications* (hubungan, komunikasi), menjalin komunikasi sehingga tercipta jaringan kerja/bisnis. 9. *Competiveness* (daya saing) senang berkompetisi secara sehat karena dengan kompetisi akan membuat terpacu untuk maju.

10. *Cange* (peralihan, perubahan) tidak takut dengan perubahan dan selalu semangat untuk berubah.

1. Karakteristik Masalah.

Tercapai atau tidaknya tujuan suatu program akan tergantung pada sejumlah persyaratan teknis serta keberagaman perilaku yang diatur, mengetahui karakteristik masalah dalam setiap akan menyelenggarakan suatu kebijakan menjadi suatu keharusan bagi pembuat kebijakan. Dengan mengetahui karakteristik masalah dalam suatu proses pelaksanaan kebijakan akan membuat suatu kebijakan menjadi lebih terarah dan terencana dalam pelaksanaannya. Aspek-aspek teknis dari permasalahan serta perilaku yang akan diatur menjadi bagian penting didalamnya. Dalam melaksanakan program pelatihan wirausaha model CEFE pelaksana harus mengetahui apa saja yang menjadi karakteristik masalah dalam setiap pelaksanaan pelatihan, termasuk didalamnya kesiapan panitia, instruktur,

sarana dan prasarana pendukung pelatihan.

Wawancara peneliti terkait dengan Program Pelatihan Kewirausahaan Model CEFE yang dilaksanakan, Dra.Ss mewakili Kepala mengatakan

".....Program Pelatihan Wirausaha Model CEFE merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah pada rendahnya jumlah wirausaha di Indonesia, secara singkat CEFE adalah suatu pelatihan yang bertujuan untuk merekrut, melatih dan mengembangkan jiwa wirausaha peserta pelatihan agar dapat lebih bersaing dan memanfaatkan peluang wirausaha, Pelatihan CEFE dilaksanakan setiap tahun sebagai program tahunan dan merupakan program unggulan jadi kami akan selalu menganalisa apa saja yang menjadi pemasalahan di dalamnya dan kami akan memperbaikinya dalam pelaksanaan berikutnya"

Instansi penyelenggara pelatihan harus memperhatikan beberapa hal yang menjadi karakteristik masalah dalam kaitan pentingnya atau perlu tidaknya program pelatihan dilaksanakan. Hal pokok yang menjadi dasar dilaksanakannya program pelatihan adalah kepedulian pemerintah pada kurang berkembangnya perekonomian di kota Pontianak, yang dapat dilihat dari kecilnya

presentase wirausaha dibandingkan jumlah penduduk yang ada di kota Pontianak, dengan mengetahui karakteristik masalah yang ada dalam pelaksanaan pelatihan wirausaha model CEFE diharapkan pihak pelaksana pelatihan dapat meminimalkan kemungkinan kesalahan-kesalahan ataupun resiko-resiko yang terjadi. Beberapa hal yang perlu dipahami dalam mengetahui karakteristik masalah dalam suatu pelaksanaan suatu kebijakan yaitu : Ketersediaan teknologi dan teori teknis, keberagaman perilaku kelompok sasaran, perbandingan jumlah penduduk dengan kelompok sasaran, derajat perubahan perilaku yang diharapkan. Selanjutnya dalam proses pelaksanaan program pelatihan wirausaha CEFE di kota Pontianak mulai proses awal yaitu pengumuman hendaknya menggunakan berbagai ketersediaan teknologi yang ada, sehingga calon peserta merasa nyaman sejak membaca pengumuman, mendaftar, mengikuti tes hingga mengetahui hasil tes, untuk selanjutnya jumlah peserta pelatihan dapat diperbanyak menyesuaikan peningkatan jumlah peminat yang meningkat dari tahun ke tahun, sedang dalam proses pelaksanaannya instruktur sebaiknya selain mempunyai sertifikat sebagai seorang instruktur lebih baik lagi jika mempunyai latar belakang entrepreneur agar lebih menjiwai apa

yang disampaikan kepada peserta pelatihan dan lebih peka dalam membantu peserta pelatihan dalam menganalisa resiko resiko dalam berwirausaha.

2. Daya Dukung Peraturan

Suatu kebijakan dibuat harus mempunyai daya dukung peraturan artinya suatu kebijakan dibuat dengan memperhatikan dan mempersiapkan peraturan yang menjadi landasan dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut dengan memprediksi dan mempersiapkan peraturan tentang sanksi bila ada pelanggaran dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, suatu kebijakan juga harus mempunyai : Kejelasan /konsistensi tujuan, teori kausal yang memadai, sumber keuangan yang mencukupi, integrasi organisasi pelaksana. Dalam pelaksanaan selanjutnya peraturan tentang petunjuk pelaksanaan secara detail tentang pelatihan serta sumber keuangan yang memadai harus di persiapkan kembali menyesuaikan pertambahan jumlah peserta pelatihan.

3. Variabel Non Peraturan

Dalam proses implementasi suatu kebijakan setiap pembuat kebijakan harus memperhatikan variabel non peraturan yaitu kondisi yang ditetapkan secara tidak tertulis yang sudah menjadi kebiasaan

dalam lingkungan tersebut yaitu : Kondisi sosial budaya ekonomi di sekitar, perhatian pers terhadap masalah kebijakan tersebut. dukungan publik, sikap dan sumber daya sasaran utama, komitmen dan kemampuan pejabat pelaksana. Dimana dalam proses perekrutan peserta penyelenggara harus menyesuaikan persyaratan dengan kondisi masyarakat sebagai sarana utama, sebagai contoh jika masyarakat di sekitar mayoritas adalah petani hendaknya pelatihan lebih difokuskan pada pelatihan yang meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengolah hasil pertanian demikian juga bila sebagian besar masyarakat pelatihan adalah penjahit atau nelayan hendaknya pelatihan lebih difokuskan pada peningkatan sumber daya yang disesuaikan dengan kebutuhan, perhatian terhadap masalah kebijakan tersebut, semakin besar perhatian pers terhadap suatu kebijakan yang akan dan sedang dilaksanakan akan semakin banyak orang yang akan peduli dan menjadi pemerhati dan pengawas terhadap terlaksananya kebijakan tersebut. Secara tidak langsung akan mengurangi resiko kesalahan yang akan terjadi dalam proses pelatihan. Dukungan publik dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan sangat diperlukan, dukungann publik dapat berupa kepedulian untuk menjadi calon

peserta pelatihan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh panitia, sikap sumber daya sasaran utama ketertarikan sekelompok masyarakat yang menjadi peserta pelatihan wirausaha model CEFE merupakan sumber daya sasaran utama dalam proses pelaksanaan kebijakan yang dilakukan, komitmen dan kemampuan pejabat pelaksana suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik bila para pejabat pelaksana mempunyai komitmen dan kemampuan dalam memimpin anggota organisasi tersebut untuk turut serta dan mendukung dalam –roses pelaksanaan kebijakan yang telah disetujui untuk dilaksanakan

E. PENUTUP

a) Kesimpulan

1. Karakteristik Masalah merupakan salah satu faktor penyebab belum berjalan dengan baiknya proses pelatihan wirausaha model CEFE di Pontianak, kurang mamahmi karakteristk masalah dalam setiap menyelenggarakan kebijakan menjadikan suatu kebijakan tidak berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan menjadi tidak terarah. Kesulitan-kesulitan yang ditemui di lapangan saat suatu

kebijakan dilaksanakan baik kesulitan yang bersifat teknis maupun non teknis, menjadi suatu hambatan terlaksananya suatu kebijakan. Kurang tersedianya teknologi dan teori teknis kurang memahami tentang keberagaman perilaku masyarakat yang menjadi kelompok sasaran serta kurang memperhatikan perubahan perilaku masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kebijakan menjadikan proses pelaksanaan program pelatihan wirausaha model CEFE di Kota Pontianak belum berjalan dengan baik.

2. Daya Dukung Peraturan yang jelas menjadikan suatu kebijakan lebih terarah dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Dalam proses pelaksanaan pelatihan kewirausahaan model CEFE ternyata masih kurang dilengkapi dengan daya dukung peraturan, hal itu dapat dilihat dari kejelasan/konsistensi tujuan yang belum jelas, teori kausal yang belum memadai, sumber keuangan yang belum mencukupi serta integritas organisasi pelaksanan yang belum mendukung keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan.
3. Variabel non peraturan yaitu adanya kondisi yang tidak tertulis yang menjadi kebiasaan yang dilakukan di tempat dilaksanakannya suatu

kebijakan sehingga akan berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan. Perbedaan waktu dan wilayah hukum pemerintahan dalam hal kondisi sosial, ekonomi dan teknologi berpengaruh terhadap upaya pencapaian tujuan yang digariskan dalam suatu peraturan. Memperhatikan kondisi sosial budaya ekonomi disekitar serta memperhatikan kepedulian pers atau media dan publik pada suatu kebijakan yang akan dilaksanakan merupakan hal penting bagi pembuatan kebijakan agar dapat memperkirakan dampak suatu kebijakan yang akan dilaksanakan di suatu tempat.

b) Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti merasa sangat perlu memberikan masukan agar ke depannya proses pelaksanaan pelatihan kewirausahaan model CEFE di Kota Pontianak dapat berhasil dan menjadi lebih baik. Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis sebagai suatu masukan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui berbagai karakteristik masalah dalam sebuah proses pelaksanaan suatu kebijakan sangat diperlukan guna meminimalkan

kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses pelaksanaan program pelatihan wirausaha model CEFE, apakah itu yang menyangkut tentang ketersediaan teknologi dan teori teknis, keberagaman perilaku kelompok sasaran, perbandingan jumlah penduduk dengan kelompok sasaran, derajat perubahan perilaku yang diharapkan.

2. Dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan yang berkaitan dengan pelatihan wirausaha model CEFE hendaknya pihak implementor membuat suatu peraturan yang dapat menjadi dasar pelaksanaan pelatihan serta selalu memperhatikan kebiasaan sosial budaya dan ekonomi di sekitar

F. DAFTAR PUSTAKA

➤ Sumber Buku:

Abdullah, Syukur. 1987. *Study Implementasi Latar Belakang, konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, Makassar : Persadi

Agustino Leo.2012,*Dasar –Dasar Kebijakan Publik*.CV.Alfabetha-Bandung

Fahmi, Irham. 2013. *Kewirausahaan Teori, Kasus dan Solusi*. Bandung : Alfabet

Gie The Liang, 1988. *Efisiensi Kerja Bagi Pembangunan Negara*. Gajah Mada University Press: Yogyakarta.

Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya : Bandung

Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. PT. Elek Media Komputindo, Gramedia : Jakarta

Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabet

Purwadarminta .1991, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. PT. Gramedia: Jakarta

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabet : Bandung.

Sugito, Maryuni Sri, Sudirman. 2011. *Pedoman Penulisan Skripsi Fisip Untan*. Untan: Pontianak.

Siagian, Sondang P. 2006. *Manajemen Abad 21. Edisi Keempat* Bumi Aksara: Jakarta.

Santosa Pandji. 2008. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. PT. Refika Aditama, Bandung

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo : Yogyakarta

Wibawa, Samodra dkk. 2010. *Evaluasi Kebijakan Publi*. Jakarta : PT. raja Grafindo Persada

www.evaluasi_kebijakan_publik.co.id
diambil tanggal 13 Maret 2015

➤ Skripsi

Azizah. 2011. “ *Faktor –faktor Keberhasilan Pelatihan Model CEFE di Kalimantan Barat* “. (Skripsi)

Hilmaniar, U. 2011. “ *Pelatihan Wirausaha Model Creation Of Enterprises Formation Of Entrepreneurs (CEFE) Bagi Tumbuh Kembang Wirausaha di Kalimantan Barat* “. (Skripsi)

Buku Kalimantan Barat Dalam Angka Tahun 2013 diterbitkan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat

Laporan Kegiatan Kewirausahaan Model CEFE 2011. UPIKM-Pontianak

Laporan Kegiatan Kewirausahaan Model CEFE 2013 UPIKM- Pontianak

Laporan Akuntabilitas UPIKM Tahun



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : SUSILA ERYAWATI
 NIM / Periode lulus : E2111066 / III
 Tanggal Lulus : 11 JAN 2016
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / IAIN
 E-mail address/ HP : sernawati@yahoo.co.id / 082152588603

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa*) pada Program Studi Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

EVALUASI PROGRAM PELATIHAN WIRASUSAHA
 MODEL CAFE DI KOTA PONTIANAK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*
 content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui/ disetujui
 Pengelola Jurnal

[Signature]
 NIP.

Dibuat di : Pontianak
 Pada tanggal : - MARET 2016

[Signature]
 SUSILA ERYAWATI
 NIM. E2111066

Catatan :
 *tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)